

SKRIPSI

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022-2024

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

ASTI ELPI NINGSI

220412003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2022-2024**



Oleh:

ASTI ELPI NINGSI

220412003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

Disusun dan diajukan oleh:

ASTI ELPI NINGSI

220412003

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Dihadapan Dewan Skripsi

Teluk Kuantan, Juni 2026

Pembimbing I



M. Irwan, SE., MM
NIDN.1012058301

Pembimbing II



Yeni Sapridawati, SE., S.Ak
NIDN. 1011019002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yeni Sapridawati, SE., S.Ak
NIDN. 1011019002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

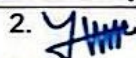
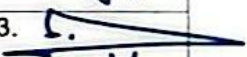
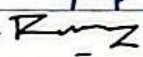
**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

Disusun dan diajukan oleh:

ASTI ELPI NINGSI
220412003

Telah Dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi
Pada Tanggal 18 Juni 2026
Dan dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris/Pembimbing 2	2. 
3.	M. Irwan, SE.,MM	Pembimbing 1/Anggota 1	3. 
4.	Dizkhamarzaweny, SE., MM	Anggota/ Penguji 1	4. 
5.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota/ Penguji 2	5. 

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Ilmu Sosial**


Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

**Ketua
Program Studi Akuntansi**


Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ASTI ELPI NINGSI

NPM : 220412003

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022-2024"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 07 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



ASTI ELPI NINGSI
NPM.22012003

"Prosesnya mungkin bikin lelah, tapi dengan bismillah insyaallah endingnya alhamdulillah".
Al-Insyirah: 1-8

"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit, teruslah berusaha lawan semuanya dengan do'a".
Umar Bin Khattab

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupa masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman."
(Andmesh Kamaleng)

PERSEMBAHAN

"Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini."

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirabilalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024”, selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M,S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M.Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan

pembimbing 2 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran, serta dorongan yang sangat berarti kepada peneliti

4. Bapak **M. Irwan, SE., M.M** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran, serta dorongan yang sangat berarti kepada peneliti.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Camat **Paimun Hendro, Sp**, Ibu **Marlena, Sp** selaku Kasubbag Program, Bapak **Dodi Hermantro** selaku Kasubbag Keuangan, Bapak/Ibu Bendahara dan seluruh staf Kantor Camat Benai yang membantu penulis dalam memperoleh data-data dan memberikan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
7. Terisitimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Yulihis** dan Ibunda **Lesti Meihesi**, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, segala do'a dan pengorbanan yang tiada henti. Tanpa dukungan dan cinta yang tulus dari Ayah dan Ibu mungkin langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini.
8. Saudara kandung **Risma Okpi Lianti** dan **Ahmad Yafiq** serta saudara sepupu **Amadea Yohana** terima kasih selalu memberikan semangat, dan dukungan dalam membantu penulis membuat skripsi sampai selesai serta keluarga besar yang selalu memberi do'a dan dukungan kepada penulis.

9. Sahabat dan teman teman yang seperjuangan yang menjadi salah satu penyemangat dan memberikan dorongan kepada penulis, dan juga menjadi sumber inspirasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung.
11. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri **Asti Elpi Ningsi**. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri samap dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik positif yang membangun sangat penulis harapkan dalam perbaikan untuk selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan. 07 April 2026

ASTI ELPI NINGSI
22012003

ABSTRAK

Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024

**Asti Elpi Ningsi
M. Irwan
Yeni Sapridawati**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kantor Camat Benai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana data sekunder berupa penyusunan anggaran, sejarah singkat, serta struktur organisasi Kantor Camat Benai. Sedangkan data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang terkait dalam penelitian ini. Informan yang diwawancarai yaitu Camat, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Program, dan Bendahara.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan pedoman perencanaan dilakukan secara berjenjang melalui RKPD dan Musrenbang, persiapan anggaran disusun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, penentuan anggaran bersifat partisipatif melalui Musrenbang dan hasil evaluasi kinerja, serta pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup efektif dan efisien dengan tingkat realisasi sekitar 90%–95% setiap tahun serta didukung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Realisasi, dan Efisiensi.

ABSTRACT

Budget Preparation Analysis at the Benai Sub-district Office, Kuantan Singingi Regency for the 2022-2024 Fiscal Year

**Asti Elpi Ningsi
M. Irwan
Yeni Sapridawati**

This research was conducted at the Benai Sub-district Office, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine whether the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Benai Sub-district Office is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. The method used in this research is descriptive qualitative. The data used in this study consist of secondary and primary data. Secondary data include budget preparation documents, brief history, and the organizational structure of the Benai Sub-district Office. Meanwhile, primary data were obtained from observations and interviews related to this study. The informants interviewed were the Sub-district Head (Camat), Head of Finance Subdivision, Head of Program Subdivision, and the Treasurer.

Based on the research, it can be concluded that the budget preparation process at the Benai Sub-district Office, Kuantan Singingi Regency, is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. The stages of determining planning guidelines, budget preparation, budget determination, and budget implementation have been carried out properly and in accordance with the regulation.

The results of the study show that the determination of planning guidelines is carried out in stages through the RKPD and Musrenbang. Budget preparation is based on the evaluation of the previous year's performance with the principles of effectiveness and efficiency. Budget determination is participatory through Musrenbang and performance evaluation results. Furthermore, budget implementation has been running quite effectively and efficiently, with a budget realization rate of around 90%–95% each year, and is supported by the principles of accountability and transparency.

Keywords : ***Regional Revenue and Expenditure Budget, Realization, and Efficiency***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Anggaran	9
2.1.2 Tujuan, Manfaat dan Kelemahan Anggaran.....	10
2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran	14
2.1.4 Penyusunan Anggaran.....	17
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
2.1.6 Adapun proses penyusunan anggaran berdasarkan permendagri Nomor 77 tahun 2020 sebagai berikut:	21
2.1.7 Pengertian Penganggaran Sektor Publik	27
2.1.7.1 Fungsi Penganggaran Sektor Publik	28
2.1.7.2 Manfaat dan Tujuan Penganggaran Sektor Publik.....	29
2.1.7.3 Jenis Penganggaran Sektor Publik	30
2.1.8 Laporan Realisasi Anggaran	33
2.1.9 Pengukuran Efisiensi Anggaran	35
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41

3.1	Rancangan Penelitian	41
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1	Tempat Penelitian	41
3.2.2	Waktu Penelitian	42
3.3	Populasi dan Sampel	42
3.3.1	Populasi	42
3.3.2	Sampel.....	42
3.4	Jenis Data Dan Sumber Data	43
3.4.1	Jenis Data.....	43
3.4.2	Sumber data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambarann Umum Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Sejarah dan Profil Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Visi dan Misi Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Struktur Organisasi Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Tugas dan Wewenang	Error! Bookmark not defined.
4.2	Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.
4.3	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Analisis Penentuan Pedoman Perencanaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Analisis Persiapan Anggaran	Error! Bookmark not defined.
4.3.3	Analisis Penentuan Anggaran	Error! Bookmark not defined.
4.3.4	Analisis Pelaksanaan Anggaran.	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		
		47

5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Anggaran Kantor Camat Benai Sumber APBD Kabupaten KuansingPeriode 2022-2024.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	42
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	42
Tabel 4.1	Perbandingan Penentuan Pedoman Perencanaan Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2	Perbandingan Persiapan Anggaran Berdasarkan Permendagri dan Kantor Camat Benai.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Perbandingan Penentuan Anggaran Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Benai.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4	Perbandingan Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Benai.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran Kantor Camat Benai kab. Kuantan singingi tahun 2026	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Benai	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Laporan Realisasi Keuangan Kantor Camat Benai
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
Lampiran 6	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	Biodata Diri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Pemerintah memiliki tujuan yang akan dicapai yang dituang dalam bentuk target atau sasaran. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutisertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan sebuah perusahaan untuk jangka waktu atau periode dimasa yang akan datang. Menurut M. Fuad dkk (2020:2), Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka

dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang.

Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemerdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBN satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan (26 urusan wajib, 8 urusan pilihan). Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 26 urusan wajib pemerintahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Serdang Nomor 05 Tahun 2007 Tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah.

Pedoman dalam penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada proses penyusunan renja SKPD Kantor Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang dilihat kembali dari data program dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024, kemudian data tersebut dianalisis kembali serta disesuaikan dengan perkembangan atau isu actual baik bersifat nasional maupun daerah.

Kegiatan analisis bertujuan untuk menilai atau mengetahui seberapa besar sasaran program dan kegiatan telah dicapai dalam kurun waktu tertentu serta mengidentifikasi penyebab masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan sasaran program dan kegiatan. Adapun hal yang akan dianalisis antara lain pelaksanaan renja SKPD, review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD, dan analisis capaian kinerja pelayanan SKPD.

Renja OPD Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sangat berkaitan erat dengan Dokumentasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan dalam penyusunan dokumen kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga program dan kegiatan OPD secara jelas ditampung tujuan dalam rencanan anggaran. Rencanan strategis OPD merupakan hasil penjabaran dari visi,misi strategi dana rah kebijakan pemerintah daerah yang selanjutnya penjabarannya dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja terhadap program kegiatan.

Berikut data renja target dan realisasi anggaran di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Anggaran Kantor Camat Benai Sumber APBD

No	Urusan/Bidang UsahaPemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Rencana Anggaran (2022)		Rencana Anggaran (2023)		Rencana Anggaran (2024)	
		Kebutuhan Dana/Pagu (Indikator Rp)	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu (Indikator Rp)	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu (Indikator Rp)	Target Capaian Kerja
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Rp 2.809.027.506	74,72	Rp 3.402.544.697	90,25	Rp3.697.950.635	92,09
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 2.465.284.638	78,7	Rp 2.776.956.106	90,58	Rp2.728.337.822	98,26
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pmda	Rp 169.248.168	76,37	Rp 325.404.240	97,47	Rp 361.166.662	89,23
4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 41.235.000	43,42	Rp 84.500.000	97,21	Rp 87.650.000	46,61
5.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 4.000.000	0	Rp 5.000.000	76,8	Rp 12.000.000	57,67
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 18.520.000	98,97	Rp 100.000.000	89,47	Rp 200.000.000	48,05
7.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 26.040.000	95,68	Rp 40.000.000	90,64	Rp 45.090.000	95,59
8.	Program pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 101.400.968.062	37,298	Rp 603.485.000	90,26	Rp 581.562.000	6,7
	Jumlah	Rp 106.934.323.374		Rp7.337.890.043		Rp7.713.757.119	

Sumber: Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi,2026

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu Target dan Realisasi Anggaran Kantor Camat Benai Sumber APBD periode 2022-2023 anggaran dana mengalami kenaikan dan target capaian kerja juga mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya berdasarkan bidang usaha pemerintah daerah dan program kegiatan Kantor

Camat Benai. Pada program kegiatan Kantor Camat Benai salah satunya program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota, anggaran yang direncanakan pada tahun 2022 yaitu Rp 2,809,027,506,74 dengan target capaian kerja sebesar 74,72%. Untuk tahun 2023, anggaran meningkat menjadi Rp 3,402,544,697,97 dengan target capaian kerja 90,25%. Dan tahun 2024, anggaran lebih meningkat lagi sebesar Rp 3,697,950,635,99 dengan target capaian kerja 92,09%. Peningkatan anggaran dari tahun 2023-2024 adanya kenaikan kebutuhan dana, dan dapat dilihat juga target capaian kerja dari tahun ke tahun yang semakin tinggi, ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap pelaksanaan program kegiatan Kantor Camat Benai.

Secara ringkas, proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan program kerja yang akan dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut, setelah itu dilakukan perhitungan secara rinci terhadap kebutuhan biaya masing-masing kegiatan, dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian serta efektivitas anggaran yang telah disusun (Mardiasmo, 2020).

Namun demikian, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam penyusunan anggaran, adanya program atau kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, adanya selisih antara target dan realisasi anggaran, serta belum maksimalnya efisiensi anggaran. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022–2024, penting untuk menganalisis apakah penyusunan anggaran di Kantor Camat Benai sudah sesuai pedoman Permendagri No. 77 Tahun 2020 serta bagaimana tingkat efisiensi penggunaannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Rizkina (2018) dengan judul Analisis penyusunan anggaran dan pelaksanaan APBD pada BAPEDA Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran belum dijelaskan secara rinci di tahap Renja SKPD, tetapi realisasi anggaran belanja sudah efisien.

Dalam penelitian Fitriani (2019) dengan judul Analisis evaluasi dan efisiensi anggaran pada dinas kesehatan kota padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan anggaran sudah sangat baik dengan rata-rata pencapaian lebih dari 90%, namun tingkat efisiensi masih bervariasi di antara kegiatan.

Dalam penelitian Septina (2020) dengan judul Analisis penyusunan anggaran pada kantor camat delitua kabupaten deli serdang tahun anggaran 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan permendagri No. 21 Tahun 2011 dan tingkat efisiensi anggaran belanja mencapai 56,27% yang berarti cukup baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022–2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apakah proses penyusunan anggaran pada kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Untuk Mengetahui Kesesuain penyusunan anggaran pada kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti dan juga pembaca mengenai analisis penyusunan anggaran pada kantor camat benai dan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang penyusunan anggaran sebagai perbandingan bagi peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman mengenai penyusunan anggaran serta pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang penyusunan anggaran
2. Bagi Kantor Camat Benai kabupaten Kuantan Singingi hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi anggaran serta penetapan standar biaya untuk melakukan pengelolaan anggaran program dan kegiatan pelayanan karena Kantor Camat Benai Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan.

3. Bagi Pembaca, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan tentang anggaran sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran

Manajemen perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam mengelola perusahaan. Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai apabila ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan pedoman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Perencanaan dirumuskan untuk mengembangkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan sebuah perusahaan untuk jangka waktu atau periode yang akan datang. Berikut ini merupakan definisi anggaran menurut para ahli yaitu:

Menurut M.Fuad dkk (2020:2), mendefinisikan “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa datang.

Menurut Suhardi (2019:5) mengemukakan bahwa: Budget dapat diartikan anggaran, anggaran adalah suatu rencana disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku

pada periode tertentu.

Menurut Tarumasely (2019:3) perencanaan merupakan suatu bagian penting atau tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manajemen baik secara perorangan maupun secara organisasi, perencanaan mengandung uraian tentang apa yang akan kita lakukan. Pengertian perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “proses atau cara”. Secara umum perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang tersusun secara sistematis dan terkoordinir sebelum melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan juga dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2 Tujuan, Manfaat dan Kelemahan Anggaran

Menurut Sasongko (2019:3) mengemukakan tujuan di buat anggaran yaitu:

1. Perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian keberadaban anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang di laksanakan dalam perusahaan.

Berdasarkan tujuan anggaran yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran dapat dijadikan sebagai arahan untuk mempermudah koordinasi bagian dalam perusahaan yang disusun secara sistematis agar tujuan anggaran ini dapat menjadi lebih jelas dan terarah.

Menurut M.Fuad dkk (2020:3) Kegunaan Anggaran dalam pratiknya, banyak perusahaan yang mampu membuat anggaran. Namun tanpa penyusunan anggaran, perusahaan akan kesulitan mencapai kinerja, tidak mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas, serta kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk perluasan usaha. Berikut manfaat penyusunan anggaran yaitu:

1. Adanya Penyusunan Terpadu

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun rencana dan menjalankan kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen.

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan

Anggaran dapat memberikan yang baru yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang baik membuat karyawan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan pegawai baru yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran mendukung perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan kinerja sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

3. Sebagai Alat Koordinasi

Penganggaran dapat meningkatkan koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi

perusahaan secara total. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian (divisi) secara total.

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran membutuhkan kinerja atau target standar yang dapat dibandingkan dengan realisasinya sehingga kinerja dari setiap aktivitas dapat dikatakan. Dalam menentukan standar acuan yang diperlukan karyawan yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah manfaat. Standar yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menetapkan atau ketidakpuasan. Kesalahan penetapan standar yang terlalu rendah akan meningkatkan biaya yang tidak terkendali serta menurunkan laba dan semangat kerja.

5. Sebagai Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan

Anggaran disusun dengan menerapkan standar yang relevan akan memberi baru bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menemukan langkah-langkah yang harus dicapai agar pekerjaan dapat dilakukan dengan ini perusahaan sumber-sumber daya perusahaan yang berada dalam cara yang baik menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap menguntungkan. Terhadap penyimpangan dalam operasional perusahaan perlu dilakukan evaluasi sehingga

menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya.

Sedangkan, menurut Suhardi (2019:8) menyatakan bahwa Anggaran (*budget*) bermanfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai alat penilai kelebihan/kekurangan karyawan.
2. Dapat menciptakan tanggungjawab tertentu pada diri karyawan dalam berkerja.
3. Dapat menghindari terjadinya pemborosan pada pembayaran yang tidak perlu.
4. Dapat memanfaatkan sumber daya se-efektif dan se-efisien mungkin.
5. Dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi karyawan.

Berdasarkan manfaat anggaran yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dapat menentukan tujuan dan sasaran untuk dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja selanjutnya, sementara itu anggaran juga memiliki manfaat dan fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan.

Menurut Suhardi (2019:15) kelemahanya adalah:

1. Dalam penyusunan anggaran, estimasi yang dipakai belum tentu tetap dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Adakalanya juga keadaan yang dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran itu, tiba-tiba mengalami perubahan yang signifikan. Jika hal itu terjadi maka perlu dilakukan adjustment secara kontinu dengan kondisi terkini agar tidak meleset terlalu jauh.
3. Anggaran mengandung unsur *uncertainty* (ketidakpastian), karena anggaran itu disusun berdasarkan asumsi.

2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan didalam periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan.

Menerut Sasongko dan Parulian (2019:4) perusahaan menyusun anggaran induk (*master buidget*) yang dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasioanl terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran (*proforma*) laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran (*proforma*) neraca. Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasioanl yang dijalankan, seperti kigiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk terdiri dari atas sebagai berikut:

1. Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan dimasa depan.

2. Anggaran Produksi

Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus di produksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi yang akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit, serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku.

3. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung

Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selain itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung juga memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsungnya.

4. Anggaran Biaya *Overhead* Produksi

Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi.

5. Anggaran Biaya Produksi

Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada satu tahun anggaran. Anggaran produksi sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran *overhead*.

6. Anggaran Beban Operasi

Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban operasi dibagi kedalam dua kelompok, yaitu beban penjualan (*selling expenses*) dan beban administrasi (*administrastion expenses*).

7. Anggaran Laba Rugi

Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran.

8. Anggaran Kas

Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode anggaran.

9. Anggaran Necara

Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya (anggaran penjualan sampai anggaran kas). Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam suatu periode anggaran.

2.1.4 Penyusunan Anggaran

Setiap aktivitas pencapaian suatu hasil pasti membutuhkan suatu proses yang baik agar nantinya mendapatkan hasil yang di inginkan. Sama halnya dengan penyusunan anggaran, proses yang baik atas pembuatan sampai pengimplementasikan anggaran sangat diperlukan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, karena anggaran merupakan sesuatu yang cukup vital dalam menunjang kehidupan dari satu unit usaha.

Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang implementasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka panjang dan jangka pendek, neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan dimasa yang akan datang.

Penyusunan anggaran merupakan suatu alat untuk merealisasikan keinginan perusahaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang agar tercapai keinginan tersebut. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain.

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran berada di tangan pimpinan tertinggi. Menurut Putrayasa dan Saputra (2018:26) prosedur penyusunan anggaran yang digunakan yaitu :

1. *Top-Down Budgeting*

Penganggaran *top-down* adalah anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen bawahannya. Kelemahan dari metode ini yaitu kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat

dilaksanakan, sulit berhasil mencapai tujuan.

2. *Bottom-Up Budgeting*

Penganggaran *bottom-up* adalah anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen atas. Kelemahan dari metode ini yaitu seringkali tidak dipertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin dicapai terlalu mudah.

3. Gabungan

Penganggaran ini merupakan gabungan antara *Top-Down Budgeting* dan *Bottom-Up Budgeting*.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pasal 1 (1) menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam menyusun, membahas dan penetapan APBD. Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa, pedoman penyusunan APBD tahun anggaran Tahun 2019 meliputi :

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan penyabaran tahun pertama pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efesiensi efektif dan

akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementrian/Lembaga dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut di tuangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang di sepakati bersama antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tahun anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah provinsi tahun 2020 berpedoman pada RKPD tahun 2020 masing masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten /kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2020 dan RKPD provinsi tahun 2020.

1. Prinsip penyusunan APBD

Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan;
- f. Mendapatkan akses informasi seluas luasnya dengan APBD ;
- g. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ; dan
- h. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan undangan,efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan mempertahankan rasa, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Kebijakan penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD anggaran tahun 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

3. Teknis penyusunan APBD. Dan

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020.
- b. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Rancangan KUA/perubahan Kua dan Rancangan PPAS/Perubahan Kua dan rancangan PPAS /perubahan PPAS tersebut kepada DPRD dalam dokumen tersebut disepakati bersama, sehingga keterpaduan substansi KUA/ perubahan Kua dan PPAS/perubahan PPAS dalam proses penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif.

2.1.6 Adapun proses penyusunan anggaran berdasarkan permendagri Nomor 77 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan prosedur yang formal untuk memperoleh hasilnya, dalam berbagai bentuk keputusan menurut system yang terintegrasi. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran sendiri merupakan penjelasan rencana yang terinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada public (bastian, 2010) perencanaan yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

Berikut poin poin penyusunan perencanaan APBD berdasarkan PP Nomor 77 tahun 2020 dalam format kalimat skripsi:

a. Tahap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Tahapan perencanaan APBD diawali dengan penyusunan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif, serta plafon anggaran yang sementara yang akan menjadi acuan dalam proses penganggaran.

b. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA)

Kebijakan umum anggaran (KUA) disusun oleh pemerintah daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah.

c. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dirumuskan berdasarkan dokumen KUA. PPAS menentukan batas maksimal anggaran untuk program prioritas pembangunan daerah dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kinerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA –SKPD)

Setiap satuan Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mencakup, program, kegiatan dan Dokumen ini juga memuat rincian anggaran berdasarkan capaian kinerja terukur, baik dalam bentuk output maupun *outcome*.

e. Penyusunan rancangan peraturan Daerah APBD

Pemerintah daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD yang merupakan akumulasi dari RKA-SKPD. Dokumen ini disertai dengan penjelasan rinci terkait prioritas belanja daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas serta mendapatkan persetujuan.

f. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah Ranperda APBD disetujui oleh DPRD, dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Penetapan APBD ini menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran

daerah dalam satu tahun anggaran.

g. Penjabaran APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

APBD yang telah disahkan dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun untuk masing-masing SKPD. DPA memuat rincian pelaksanaan anggaran yang mendukung capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

h. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, proses perencanaan dan penganggaran APBD diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan berbasis kinerja.

2. Persiapan Anggaran

Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum menyusun anggaran, lebih dahulu penyusunan anggaran Menetapkan rencana besar organisasi, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran, Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, persiapan anggaran daerah merupakan tahap awal dalam penyusunan anggaran yang bertujuan untuk memastikan proses perencanaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tahapan ini diawali dengan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berisi proyeksi pendapatan, rencana belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah, di mana dokumen ini menjadi dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS adalah penjabaran KUA dalam bentuk prioritas program dan plafon anggaran sementara yang ditetapkan setelah kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan PPAS, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang mencakup rincian program, kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan anggaran. Sepanjang proses ini, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan terpenuhi. Selain itu, pengawasan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip utama yang melandasi persiapan anggaran meliputi pendekatan berbasis kinerja, transparansi, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Semua langkah ini menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

3. Penentuan Anggaran

Tahapan diadakannya rapat dari semua divisi, dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusan anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penentuan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui proses yang sistematis dan

berbasis kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penentuan anggaran dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan. RKPD disusun berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya dan melalui mekanisme Musrenbang untuk menjaring aspirasi masyarakat serta memastikan keselarasan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Langkah berikutnya adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi dasar penentuan batas maksimal alokasi anggaran untuk setiap program atau kegiatan. KUA berisi proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sementara PPAS merinci plafon anggaran untuk masing-masing SKPD berdasarkan prioritas pembangunan. KUA dan PPAS ini dibahas bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan. Setelah itu, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKASKPD) yang memuat rincian kebutuhan anggaran berdasarkan PPAS. Dokumen ini kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan. RKA SKPD yang telah diverifikasi digabungkan menjadi rancangan APBD, yang kemudian dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

4. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran adalah tahap yang sangat penting dalam perealisasi program dan kegiatan pemerintah yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran adalah suatu

dokumen yang dibuat untuk dijadikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pelaksanaan anggaran daerah merupakan tahap penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi realisasi pendapatan, pelaksanaan belanja, serta pengelolaan pembiayaan. Tahapan ini dilakukan setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai rencana.

Pelaksanaan anggaran dimulai dengan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh masing-masing SKPD berdasarkan anggaran yang telah disetujui. Kepala SKPD bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Proses ini melibatkan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Dalam hal realisasi belanja, kepala SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada bendahara daerah, yang kemudian diproses menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) dan akhirnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Realisasi pendapatan daerah juga dikelola dengan memastikan sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, dan lainnya masuk sesuai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran ini mengedepankan prinsip akuntabilitas dan berbasis kinerja, dengan laporan realisasi anggaran disusun secara berkala untuk mencatat capaian dan kendala yang dihadapi. Dokumen laporan keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.

2.1.7 Pengertian Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program yang telah di sahkan. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang mengembangkan kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Anggaran sektor publik adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan

kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Sujarweni, 2020).

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah suatu instrumen akuntabilitas atas rencana terinci untuk masa mendatang tentang pemerolehan sumber daya keuangan dalam suatu periode tertentu yang bertujuan untuk pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

2.1.7.1 Fungsi Penganggaran Sektor Publik

Sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam membangun suatu wilayah, anggaran sektor publik memiliki fungsi utama yang dijelaskan oleh Nurkholis dan Khusaini (2019:6-8) adalah sebagai berikut:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada *public*.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan *fiscal* pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam perncapain tujuan organisasi.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budger holder* (eksklusif) kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenge but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi.

2.1.7.2 Manfaat dan Tujuan Penganggaran Sektor Publik

Menurut Suhardi (2019:8) menyatakan bahwa anggaran (*budget*) bermanfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai alat penilai kelebihan/kekurangan karyawan

2. Dapat menciptakan tanggungjawab tertentu pada diri karyawan dalam bekerja.
3. Dapat menghindari terjadinya pemborosan pada pembayaran yang tidak perlu.
4. Dapat memanfaatkan sumber daya se-efektif dan se-efisien mungkin.
5. Dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi karyawan.

Berdasarkan manfaat anggaran yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dapat menentukan tujuan dan sasaran untuk dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja selanjutnya, sementara itu anggaran juga memiliki manfaat dan fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan.

2.1.7.3 Jenis Penganggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Menurut Halim dan Kusufi (2016:52) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di Negara Berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu:

- a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism.
- b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat linier-item.
- c. Cenderung sentralistik.
- d. Bersifat spesifikasi.
- e. Tahunan.
- f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto.

2. Pendekatan *New Public Management*

New Public Management berfokus pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma *new public management* telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu:

a. Anggaran Kinerja (*Performance Budgeting*)

Anggaran dengan pendapatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

b. Anggaran Program (*Program Budgeting*)

Metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan dari aktivitas pemerintahan dari pada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah.

c. Anggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting-ZBB*)

Penyusunan anggaran ini dapat mengatasi kelemahan pendekatan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (*zero based*), tidak berdasarkan pada tahun lalu tapi berdasarkan kebutuhan saat ini.

d. *Planing, Programing and Budgeting System* (PPBS)

PPBS merupakan suatu anggaran dimana pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja. PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integritas dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Selain itu, menurut Mahmudi (2016:69) anggaran sektor publik yaitu:

1. *Line Item Budget*

Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output.

2. *Inclemental Budget*

Inclemental Budget adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Dalam pratiknya inclemental budget seringkali diikuti dengan sistem *line item budget*.

3. *Planing, Programming, Budgeting System (PPBS)*

PPBS merupakan sistem penganggaran yang penyusunan anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Renstra unit kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kinerjanya.

4. *Zero Based Budget (ZBB)*

ZBB adalah sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol.

5. *Permormance Budget*

Permormance Budget adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

2.1.8 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan

informasi tentang indikasi apakah sumber dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, sesuai dengan anggaran yang diterapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mahsuri, 2018:5).

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara berikut pada setiap halaman laporan:

1. Nama entitas pelaporan pemerintah atau saran indentifikasi lainnya.
2. Cakupan entitas pelaporan.
3. Mata uang pelaporan
4. Periode yang cukup
5. Satuan angka yang digunakan.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisinesi dan efektivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.1.9 Pengukuran Efisiensi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:166) “Menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).”

Proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka-angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk resiko ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nanda dan Darwanis (2016)	Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)	Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat diterapkan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dinilai masih belum optimal dan tingkat tanggung jawab aparatur dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi juga masih rendah.
2	Affandi et al., (2017)	Analisis Sistem Penyusunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado)	pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado tahun anggaran yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013. Proses penyusunan anggaran dilakukan melalui tahapan perencanaan yang sistematis, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan dalam sistem penganggaran daerah, sehingga menghasilkan anggaran yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip perencanaan anggaran sektor publik.
3	Karunia dan Sapari (2018)	Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang	Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sejak tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala karena sistem yang digunakan masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi sehingga menyebabkan proses penganggaran belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah merencanakan penerapan sistem e-budgeting pada tahun anggaran 2019 agar proses penganggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, pemerintah daerah berupaya melaksanakan setiap program kerja secara optimal serta menyesuaikannya dengan aspirasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			masyarakat Kabupaten Malang (Karunia, 2019).
4	Zulkarnain & Nurdianti (2020)	Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan pada tahap perencanaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Raperdes tentang APBDesa, pada tahap pelaksanaan yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta pada tahap pelaporan yang belum dilakukan secara rutin setiap bulan kepada Kepala Desa. Selain itu, fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah juga belum berjalan secara optimal sehingga berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
5	Riska Septina (2020)	Analisis Penyusunan Anggaran pada Kantor Camat Delitua Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan Permendagri N0. 21 Tahun 2011 dan tingkat efisiensi anggaran belanja mencapai 56,17% yang berarti cukup baik..
6	Hidayat (2022)	Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 38 Tahun 2018. Selain itu, pelaksanaan anggaran pada tahun 2018–2019 secara umum berada pada kategori cukup baik berdasarkan PMK No. 249/PMK.02/2011. Sementara itu, pada laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019, sebagian besar komponen pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah,

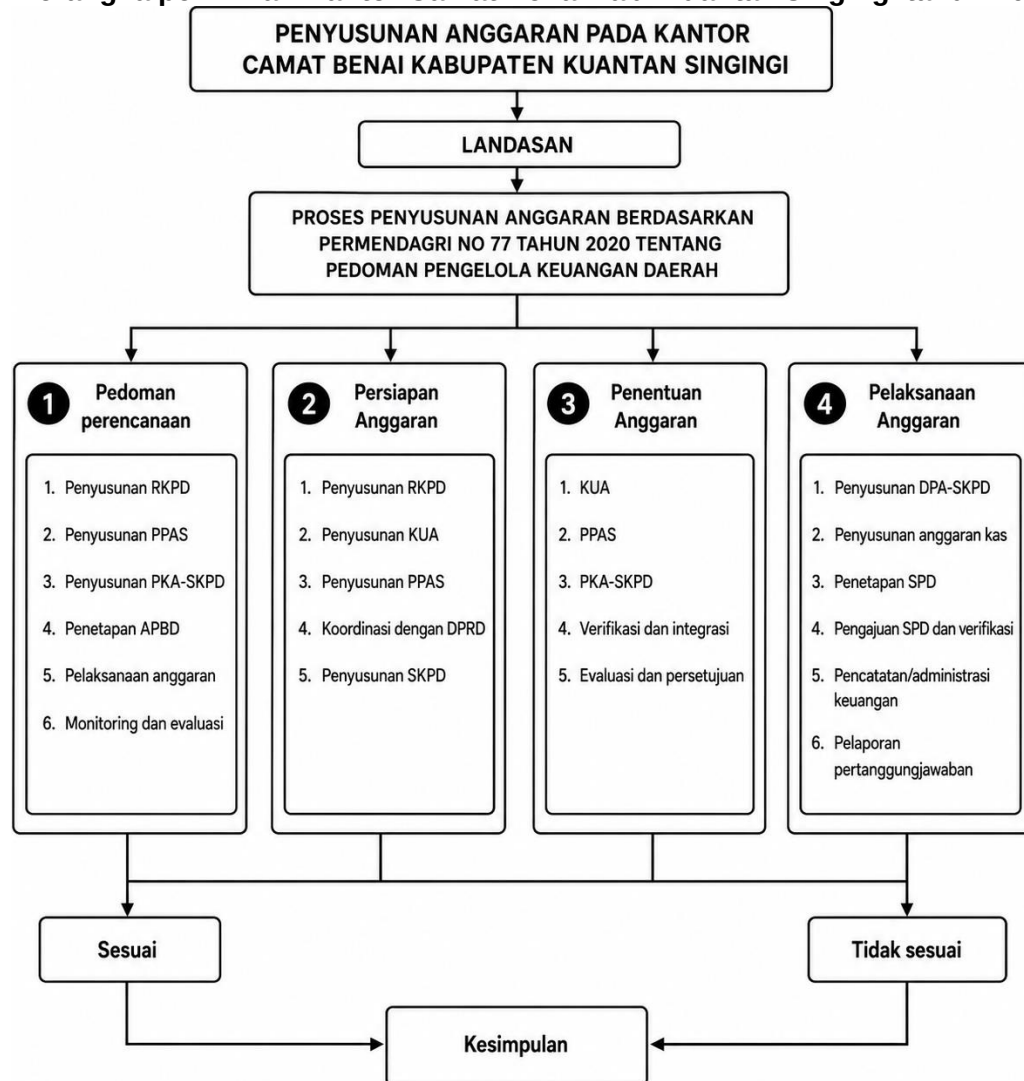
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pendapatan transfer, serta belanja operasional dan belanja modal menunjukkan kategori sangat baik, meskipun terdapat beberapa aspek seperti belanja tidak terduga yang masih berada pada kategori kurang baik.
7	Warisman dan Wulandari (2022)	Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di Kantor Kecamatan Senen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada periode 2019–2021 mencapai 94,58% yang termasuk dalam kategori efisien.
8	Vinalia et al., (2023)	Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa sudah berjalan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku.
9	Lantowa (2023)	Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan teori Nafarin (2014:14) yang meliputi penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pada rencana kerja program dan kegiatan ditemukan bahwa sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal pada periode 2017–2021

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			akibat adanya pandemi COVID-19, terutama kegiatan yang bersifat pengumpulan massa sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan.
10	Djami (2023)	Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 27 Tahun 2021, Perda Kabupaten Sumba Timur No. 4 Tahun 2022, dan Perbup No. 64 Tahun 2022. Tahapan persiapan anggaran dilakukan selama satu bulan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, disiplin, keadilan, serta pendekatan kinerja. Penentuan anggaran dilakukan dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pelaksanaan anggaran dinilai efektif dan tepat sasaran dengan tingkat realisasi mencapai 97,80%.

Sumber: Data Olahan, 2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
kerangka pemikiran Kantor Camat Benai kab. Kuantan singingi tahun 2026



Sumber: Djami (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran pada kantor camat benai Kabupaten Kuantan Singingi dan menjelaskan data keuangan tersebut dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan terjun langsung ke Kantor Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut sugiyono. (2021:10) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai penyusunan anggaran di Kantor Benai Kabupaten Kuantan singingi.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dan menyajikan serta menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Sep 2025	Okt 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Juli 2026
1	Mengajukan Proposal							
2	Proposal diterima							
3	Bimbingan proposal							
4	Mengumpulan data							
5	Wawancara							
6	Seminar proposal							
7	Revisi proposal dan perbaikan							
8	Penelitian dan bimbingan							
9	Ujian skripsi							

Sumber, Diolah Peneliti, 2026

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Indriantoro dan Bambang 2016: 115).

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 PNS dan orang 16 PPPK.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut (Indriantoro dan Bambang, 2016:115). Penyempelan atas respoden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2017:2018). Sampel pada penelitian ini Camat, Sekretaris, Kasubbag Keuangan

dan Kasubbag Program. Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pegawai yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022–2024.
3. Memiliki pengalaman kerja yang memadai sehingga memahami mekanisme penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
4. Bersedia menjadi informan penelitian serta memberikan informasi secara jujur, objektif, dan terbuka selama proses wawancara.
5. Memiliki kewenangan atau kompetensi dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Unsur Informan	Jumlah Informan
1.	Camat	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubbag Keuangan	1
4.	Kasubbag Program	1
Jumlah		4

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari

data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelelahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

3.4.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua macam sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui wawancara atau *interview* dengan pimpinan perusahaan atau pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan atau permasalahan yang diajukan peneliti (Sugiyono, 2016:104). Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan Camat, Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Bendahara di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2016:104). Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka dapat dikatakan data sekunder ini bisa bersal dari dokumen-dokumen grafiss seperti table, catatan, foto, melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di Kantor Camat Benai kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni :

- a. Teknik wawancara (interview), digunakan sebagai teknik pengumpula data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018:231). Wawancara secara langsung dengan Camat, Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, dan Bendahara Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi mengenai prosedur penyusunan APBD Kantor Camat Benai.

- b. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Catatan peristiwa yang berlaku berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono 2018:240). Dokumen-dokumen terkait dengan penyusunan APBD Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengalami perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam, dan responden (Sugiyono,2017:106). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan penyusunan anggaran yang ada di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode

dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, melalui observasi hingga penyusunan laporan. Mengumpulkan data dengan cara melihat laporan realisasi anggaran. Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan dengan:

- 1) Mengumpulkan data dengan wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran.
- 2) Membandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020.
- 3) Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran.
- 4) Mempelajari bagaimana tahap perencanaan sampai dengan pengawasan anggaran.
- 5) Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil dari pada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak menguntungkan persentasenya menunjukkan selisih lebih sedangkan jika anggarannya lebih besar dari pada realisasi dan persentase selisih menunjukkan selisih kurang maka artinya menguntungkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penyusunan Anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Kantor Camat Benai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari **Penentuan, Pedoman, Perencanaan** yang dilakukan secara berjenjang dengan mengacu pada RKPD dan melalui Musrenbang, **Persiapan** anggaran yang dilakukan melalui rapat kerja dengan melibatkan pihak terkait serta mempertimbangkan evaluasi anggaran tahun sebelumnya, penentuan anggaran yang memperhatikan hasil evaluasi realisasi anggaran, hasil rapat rencana kerja antarunit, serta aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada DPA-SKPD serta menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai telah dilakukan secara terencana dan terarah serta memperhatikan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat realisasi anggaran yang mencapai sekitar 90%–95% setiap tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan keempat indikator tersebut, penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022–2024 dapat dinyatakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun peneliti mencoba memberikan saran untuk

kantor camat dan peneliti selanjutnya agar kedepannya lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

a. Saran untuk Kantor Camat Benai

1. Kantor Camat Benai diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Dalam penyusunan anggaran, diharapkan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan prioritas program kegiatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar dapat berjalan lebih optimal.
4. Hasil evaluasi anggaran tahun sebelumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran pada tahun berikutnya.
5. Kantor Camat Benai diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek dan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan aspek atau indikator lain yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebagai bahan perbandingan penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan menambahkan aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam

penelitian ini, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat Nazir,
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Septika Riska (2020). Analisis penyusunan anggaran pada Kantor Camat Delitua Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019
- Djami, A. E. W. (2023). *Analisis penyusunan anggaran pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur* (Doctoral dissertation, Artha Wacana Christian University).
- Karunia, A. H. P., & Sapari, S. (2018). Analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran pemerintah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(11).
- Lantowa, F. D., Yusuf, F. M., & Mayulu, S. A. (2023). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo. *Akademika*, 11(2), 106–123.
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Rorong, R. O., & Affandi, D. (2017). Analisis sistem penyusunan anggaran pemerintah Kota Manado (Studi kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 131185.
- Taufiq, T. H. (2022). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi*, 27(1), 52–62.
- Vinalia, N., Sefitriya, R., & Priyono, N. (2023). Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa: Studi kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 115–125.

Warisman, K. S., & Wulandari, E. (2022). Analisis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat tahun anggaran 2021. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 1, pp. 323–329).

Zulkarnain, Z., & Nurdianti, W. (2020). Analisis penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Penentuan pedoman perencanaan

- a. Apakah yang menjadi landasan hukum dalam penentuan anggaran yang akan dilaksanakan pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apakah yang menjadi visi, misi, maksud dan tujuan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- c. Apakah yang menjadi latar belakang penyusunan rancangan Renja OPD yang berlaku pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Persiapan anggaran

- a. Apakah dalam persiapan anggaran Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya?
- b. Bagaimana kebijakan yang dilaksanakan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam menentukan tujuan, sasaran, dan program kegiatan setiap tahun?
- c. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran menurut Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- d. Sebutkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam persiapan penyusunan anggaran yang baik pada kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun anggaran?
- f. Siapa sajakah pihak yang ikut dalam meyusun anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Penetapan anggaran

- a. Dalam penetapan anggaran apa sajakah aspek yang menentukan keberhasilan cakupan pelayanan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi

- b. Apa saja program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- c. Sebutkan dan jelaskan batasan atau ruang lingkup Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- d. Apakah saat ini penetapan anggaran dan program Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan unsur-unsur masyarakat dan para unit terkait?
- e. Apakah Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)?

4. Pelaksanakan anggaran

- a. Bagaimana realisasi anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apa pelaksanaan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah efektif dan tepat sasaran sesuai dengan APBD yang di anggarkan pemerintah?
- c. Bagaiman peran pegawai kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas untuk merealisasikan APBD dalam program kegiatan yang telah direncanakan?
- d. Bagaimana respon masyarakat terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- e. Apa ada dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran setiap tahunnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- f. Apa ada tindak lanjut dari evaluasi terhadap terhadap program dan anggaran setiap tahunnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
- g. Menurut Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi adakah yang menjadi kelemahan dan kesalahan dari rencana kerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022-



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 099/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

TUSKAN

E., M.Ak

si

usunan Anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan
Anggaran 2022-2024.

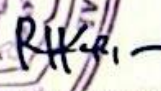
berikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1)

diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan
n Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.

onorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas

tapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau

bersangkutan untuk dapat diketahui.


DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Akuntansi
2. Mahasiswa
3. Arsip





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Januari 2026

Nomor : 012/FIS/UNIKS/I/2026
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama	: Asti Elpi Ningsi
NPM	: 220412003
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam
rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Benai Kab. Kuantan Singingi
Lokasi Penelitian	: Kantor Camat Benai, Kab. Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan
kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu
kami ucapkan terima kasih.


Dekan
SARJAN M. S. Sos., M.Si
NIDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpstsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpstsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 39/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:012/FIS/UNIKSI/2026 Tanggal 22 JANUARI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ASTI ELPI NINGSI
NIM : 220412003
Jurusan : AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2022-2024"
Untuk melakukan Penelitian di : KANTOR CAMAT BENAI KAB.KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Terbuan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN BENAI

JALAN AGUS SALIM NO. 79 BENAI KODE POS 29566

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/UM/II/2026/44

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paimun Hendro, SP
NIP : 19710702 199301 1 001
Jabatan : Camat Benai
Alamat : Jl. Agus Salim No.79 Benai Kode Pos 29566

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Asti Elpi Ningsi
NIM : 220412003
Program Studi : Akuntansi
Asal Instansi : Universitas Islam Kuantan Singingi

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian dari tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan 11 Februari 2026 yang bertempat di wilayah kerja pemerintah kecamatan Benai dengan judul penelitian **"Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 -2024"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Benai, 11 Februari 2026

PAIMUN HENDRO, S.P
NIP. 19710702 199301 1 001

KODE REKORING	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	NAMA PEKERJA NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HK)	BOBOT %	PELAKSANAAN				KEUANGAN		LOKASI (DESA / KECAMATAN / KABUPATEN)	SISA PAGO (Rp)	KET
							FISIK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM		18.820.000			0,48	98,97	97,95668922	98,97	0,00	18.330.000	98,97		190.000	
7.01.04.2.01	Kordinasi upaya penyelenggaraan Ketertambahan dan Ketertambahan Umum		18.820.000			0,48	98,97	0,473448014	98,97	0,00	18.330.000	98,97	Kec. Benai	190.000	
7.01.04.2.01.01	- Rencanana Kegiatan Ketertambahan Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		18.820.000								18.330.000				
7.01.04.2.01.02	- Rencanana Kegiatan Ketertambahan Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24.040.000			0,67	95,68	0,643532857	95,68	0,00	24.915.000	95,68		1.125.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PEMDES		24.040.000			0,67	95,68	0,643532857	95,68	0,00	24.915.000	95,68	Kec. Benai	1.125.000	
7.01.06.2.01.01	- Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat		24.040.000								24.915.000				
7.01.06.2.01.02	- Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat														
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		1.014.009.680,62			26,19	37,98	9,948505649	37,98	0,00	385.166.065	37,98		628.843.615	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		1.014.009.680,62			26,19	37,98	9,948505649	37,98	0,00	385.166.065	37,98	Kec. Benai	628.843.615	
7.01.03.2.02.01	- Penyelenggaraan Pertemuan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat		15.000.000												
7.01.03.2.02.02	- Penyelenggaraan Pertemuan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat		955.863.180,62								385.166.065				
7.01.03.2.02.03	- Penyelenggaraan Pertemuan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat		43.146.500												
JUMLAH			3.871.597.186,78			100	65,28	65,28141532	65,28	0,00	2.527.433.438,83	65,28		1.344.163.748	

Benai, 31 Oktober 2022
KEPALA OPD
CAMAT BENAI,

FAHMY KENDRO, SP
NIP. 19710702 199301 1 001

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

BULAN : DESEMBER

KODE REKENDIG	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	PAJU DANA	NILAI KONTRAK	NAMA PEKERJA TANGGAL KONTRAK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HK)	BOBOT %	REALISASI				KEUANGAN		LOKASI (DESA/ KECAMATAN / KABUPATEN)	SISA PAJU (Rp)	KET
							SENDIRI %	KUMULATIF %	TARGET %	DEVIASI %	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01	SEDANG URUSAN KECAMATAN		4.181.029.697			100,00	90,23	90,2221925	90,22	0,00	3.748.180.004	90,22		408.879.693	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAS/KOTA		3.402.544.697			81,97	90,25	73,97925402	90,25	0,00	3.070.900.804	90,25		331.643.893	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KPD		10.000.000			0,24	93,02	0,224079341	93,02	0,00	9.301.600	93,02	Kec. Benai	698.400	
7.01.01.2.01.01	Proyeksi dan Estimasi Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000								4.436.800				
7.01.01.2.01.07	Profil dan Kajian Perangkat Daerah		5.000.000								4.864.800				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.778.956.106			66,90	90,58	60,59374058	90,58	0,00	2.515.264.166	90,58	Kec. Benai	261.691.940	
7.01.01.2.02.01	Proyeksi dan Estimasi Anggaran APB		2.771.956.106								2.510.569.266				
7.01.01.2.02.05	Kendali dan Pelaksanaan Laporan Keuangan APBD		5.000.000								4.694.900				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian, Perangkat Daerah		10.000.000			0,24	100,00	0,240904062	100,00	0,00	10.000.000	100,00	Kec. Benai	-	
7.01.01.2.05.09	Penelitian dan Penelitian pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		10.000.000								10.000.000				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		178.759.200			4,26	77,52	3,301019122	77,52	0,00	187.826.639	77,52	Kec. Benai	38.733.165	
7.01.01.2.06.01	Prosedur, Standar, Sistem, Lembar Kerja, dan Instruksi		5.500.000								4.500.150				
7.01.01.2.06.04	Prosedur, Instruksi, dan Pengendalian		35.500.000								29.063.800				
7.01.01.2.06.05	Prosedur, Instruksi, dan Pengendalian		1.000.000								4.799.800				
7.01.01.2.06.06	Prosedur, Instruksi, dan Pengendalian		3.000.000								3.630.000				
7.01.01.2.06.09	Pengembangan Rantai Nilai dan Sistem APBD		136.759.200								95.437.285				
7.01.01.2.07	Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan PD		18.925.151			0,46	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	Kec. Benai	18.925.151	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mobil		18.925.151												
7.01.01.2.07.10	Pengadaan barang dan jasa lain-lain (bukan barang)		18.925.151												
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		325.454.240			7,84	97,47	7,44060383	97,47	0,00	317.163.734	97,47	Kec. Benai	8.240.506	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Ruang Kantor		300.000								170.000				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsumsi, Makanan, Minuman, dan Lainnya		48.000.000								43.441.814				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor		277.154.240								273.532.120				
7.01.01.2.09	Penelitian Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.500.000			2,04	97,21	1,978913065	97,21	0,00	82.145.269	97,21	Kec. Benai	2.354.731	
7.01.01.2.09.01	Proyeksi dan Estimasi, biaya penelitian dan pengujian keabsahan dokumen, data, dan lain-lain		15.500.000								16.464.213				
7.01.01.2.09.02	Proyeksi dan Estimasi, biaya penelitian dan pengujian keabsahan dokumen, data, dan lain-lain		10.000.000								9.096.056				
7.01.01.2.09.10	Proyeksi dan Estimasi, biaya penelitian dan pengujian keabsahan dokumen, data, dan lain-lain		59.000.000								57.583.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.000.000			0,12	76,80	0,092507168	76,80	0,00	3.840.000	76,80		1.160.000	
7.01.02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yg tidak diaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.		5.000.000			0,12	76,80	0,092507168	76,80	0,00	3.840.000	76,80	Kec. Benai	1.160.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan komunitas		5.000.000								3.840.000				
7.01.03	PROGRAM PEMERIKSAAN KAWASAN DEHA DAN KELURAHAN		603.485.000			14,54	90,26	81,46091049	90,26	0,00	544.679.600	90,26		58.805.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemeriksaan Kelurahan		603.485.000			14,54	90,26	13,12153392	90,26	0,00	544.679.600	90,26	Kec. Benai	58.805.400	
7.01.03.2.02.01	Pemeriksaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat		13.900.000								8.509.800				
7.01.03.2.02.02	Pemeriksaan Partisipasi Masyarakat & Kelurahan		508.485.000								536.079.800				
7.01.03.2.02.03	Pemeriksaan Partisipasi Masyarakat & Kelurahan		36.000.000												
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM		100.000.000			2,41	89,47	80,05189309	89,47	0,00	89.473.400	89,47		10.526.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyenggaraan Keterangan dan Keterangan Umum		100.000.000			2,41	89,47	2,105430732	89,47	0,00	89.473.400	89,47	Kec. Benai	10.526.600	
7.01.04.2.01.01	Keputusan dengan Keputusan Bupati RI, TNI dan instansi Vetikal & Wilayah Kecamatan		100.000.000								89.473.400				

KODE REKENDUNG	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	PAJU DANA	NILAI KONTRAK	NAMA PEKERJA NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HK)	BOBOT %	REALISASI				KEUANGAN		LOKASI (DESA / KECAMATAN / KABUPATEN)	SISA PAJU (Rp)	KET
							SEKIDAR %	KUMULATIF %	TARGET %	DEVIASI %	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		50.000.000								50.000.000				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERGAWARAN PEMERINTAHAN DESA		48.090.000			1,00	95,59	0,953861259	95,59	0,00	43.101.200	95,59		1.388.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PEMDES		45.090.000			1,00	95,59	0,953861259	95,59	0,00	43.101.200	95,59	Kec. Benai	1.388.800	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi pengabdian tenaga Desa dan Peningkatan Aset Desa														
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		45.090.000								43.101.200				
JUMLAH			4.518.602.639			100	79,10	79,09530201	79,10	0,00	3.574.002.401	79,10		944.600.234	

Benai, 31 Desember 2024
Kepala OPD
Camat Benai,

Palman Hendro, SP
NIP. 19710702 199301 1 001

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN : DESEMBER

KODE REKENDIT	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	PAJU DANA	NILAI KONTRAK	NAMA PELAKSANA NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HK)	BOBOT %	REALISASI				KEUANGAN		LOKASI (DESA/ KECAMATAN /KABUPATEN)	SISA PAJU (Rp)	KET
							FISIK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN		4.518.602.335			100,00	79,10	79,09330201	79,10	0,00	3.374.002.401	79,10		944.600.234	
7.01.01	PROGRAM PERURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		3.679.990.639			81,44	92,09	74,99876787	92,09	0,00	3.388.896.301	82,09		291.054.334	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KPD		10.500.000			0,23	42,14	0,097921864	42,14	0,00	4.424.700	42,14	Kec. Benai	6.075.300	
7.01.01.2.01.01	- Penyusunan Instruksi, Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000								4.424.700				
7.01.01.2.01.07	- Penilaian Kinerja Perangkat Daerah		5.500.000												
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.728.337.822			60,38	98,26	59,32701473	98,26	0,00	2.680.752.051	98,26	Kec. Benai	47.585.771	
7.01.01.2.02.01	- Penyusunan Uap dan Tanggapan ASN		2.728.337.822								2.680.752.051				
7.01.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan														
7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.000.000			0,44	75,00	0,331961033	75,00	0,00	15.000.000	75,00	Kec. Benai	5.000.000	
7.01.01.2.03.09	- Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		20.000.000								15.000.000				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		315.826.577			6,99	58,84	4,112873448	58,84	0,00	185.844.408	58,84	Kec. Benai	129.984.169	
7.01.01.2.06.01	- Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/Pem. Bang. Ktr		4.000.000								4.000.000				
7.01.01.2.06.04	- Penyediaan Inkubator Logistik Kantor		111.810.936								43.063.190				
7.01.01.2.06.05	- Penyediaan barang taksi dan pengangkutan		8.800.451								4.377.900				
7.01.01.2.06.06	- Penyediaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan		3.100.000								1.300.000				
7.01.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi HKPD		186.035.200								111.115.808				
7.01.01.2.07	Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan PD		156.487.074			3,46	89,31	3,092526856	89,31	0,00	138.739.000	89,31	Kec. Benai	16.728.874	
7.01.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel		50.000.000								49.774.000				
7.01.01.2.07.10	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung ktr /bang lainnya		89.967.574								89.965.000				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		341.164.682			7,90	89,23	7,132289319	89,23	0,00	322.279.542	89,23	Kec. Benai	38.887.120	
7.01.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		330.000												
7.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Bersih Dapur Air & Listrik		43.441.814								40.622.814				
7.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		317.395.048								281.656.728				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.630.000			1,94	46,61	0,90418661	46,61	0,00	40.896.800	46,61	Kec. Benai	46.733.400	
7.01.01.2.09.01	- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pemeliharaan dinas/jabatan		21.650.000								15.036.600				
7.01.01.2.09.02	- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, bi pemeliharaan pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas opr atas lapangan		15.000.000								1.260.000				
7.01.01.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		43.000.000								16.560.000				
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		8.000.000								8.000.000				
7.01.02	PROGRAM FERTYELONGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.000.000			0,27	57,67	0,153146003	57,67	0,00	6.920.100	57,67		5.079.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.		12.000.000			0,27	57,67	0,153146903	57,67	0,00	6.920.100	57,67	Kec. Benai	5.079.900	
7.01.02.2.02.01	- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan		12.000.000								6.920.100				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		581.562.000			12,87	6,70	0,449364312	6,70	0,00	38.984.800	6,70		542.577.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		581.562.000			12,87	6,70	0,449364312	6,70	0,00	38.984.800	6,70	Kec. Benai	542.577.200	
7.01.03.2.02.01	- Penyelenggaraan Penyelenggaraan Forum Masyarakat		15.000.000								13.022.800				
7.01.03.2.02.02	- Penyelenggaraan Forum dan Promosi Kelurahan		491.562.000												
7.01.03.2.02.03	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		75.000.000								25.962.000				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM		200.000.000			4,43	48,05	23,0880023	48,05	0,00	96.100.000	48,05		103.900.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketertambahan dan Ketertambahan Umum		200.000.000			4,43	48,05	2,126763687	48,05	0,00	96.100.000	48,05	Kec. Benai	103.900.000	
7.01.04.2.01.01	- Kegiatan dengan Kepribadian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal & Wilayah Kecamatan		150.000.000								46.100.000				

KODE REKENDIG	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	PAJU DANA	NILAI KONTRAK	RAMA REKARAN BOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (HK)	BOBOT %	REALISASI						LOKASI (DESA/ KECAMATAN /KABUPATEN)	SISA PAJU (Rp)	KET
							FISIK				KEUANGAN				
							SENDIRI %	KUMULATIF %	TARGET %	DEVIASI %	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04.2.01.02	Rencana Kerja Holistik (RKH) Tahun 2023														
7.01.06	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWARAN PEMERINTAHAN DESA		40.000.000			0,96	90,64	0,873426659	90,64	0,00	36.256.200	90,64		3.743.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PEMDES		40.000.000			0,96	90,64	0,873426659	90,64	0,00	36.256.200	90,64	Kec. Benai	3.743.800	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi pengabdian masyarakat Desa dan Pengawasan Ases Desa														
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		40.000.000								36.256.200				
	JUMLAH		4.151.029.697			100	90,22	90,2231929	90,22	0,00	3.745.150.004	90,22		405.879.693	

Benai, 31 Desember 2023
KEPALA OPD
CAMAT BENAI,

PAIMUN KENDRO, SP
NIP. 19710703 199301 1 001

- dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
 6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- #### 2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola

3. TAPD mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan Daerah;
4. pengeluaran Daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai

- dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
 6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- #### 2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola

3. TAPD mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

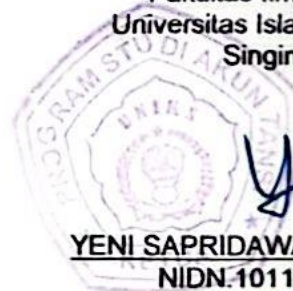
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan Daerah;
4. pengeluaran Daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Asti Elpi Ningsi
 NPM : 220412003
 PEMBIMBING 1 : M Irwan, SE., MM
 PEMBIMBING 2 : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
 JUDUL : Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai
 PROPOSAL : Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024

No	Tanggal /Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	30/10/25	Perbaikan / Revisi sesuai Catatan di cover	A.	
2.	26/11/25	Perbaikan	A.	
3.	3/12/25	Perbaikan di bab I dan Golek Layout Bab II	A.	
4.	5/12/25	Revisi	A.	
5.	10/12/25	Layout Perbaikan II	A.	

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan
 Singingi



[Handwritten signature]

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.AK
 NIDN.1011019002

No	Tanggal /Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
6.	12/2025 /12	1. Perbaiki kata pengantar 2. Perbaiki BAB I Latar belakang masalah 3. Perbaiki BAB II, populasi dan sampel		
7.	22/2025 /12	Acc Seminar Proposal		
8.	22/2025 /12	Ace Angin.		
9.				
10.				

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan
Singingi



YENI SAPRIDAWATI, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Asti elpi ningsi

NPM : 220412003

PEMBIMBING 1 : M.Irwan, SE., MM

PEMBIMBING 2 : Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak

JUDUL : Analisis Penyusunan Anggaran Pada kantor camat benai
SKRIPSI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024

No	Tanggal /Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	14/1/26	Perbaiki yg di lipa t	A.	
2.	13/26 5	Anal penulisan letak di Urutan lagi .	A.	
3.	10/26 6	Lajut penulisan !!	A.	
4.	11/2026 6	perbaiki dupper isi Tambah Sumber penulisan BAB dan spasi		Yeni

6.	12/2020 06	perbaiki BAB I perbaiki BAB IV perbaiki penulisan ya.		Yuni
7.	15/2020 06	Acc Skripsi		Yuni
8.	17/2020 06	Acc	A.	
9.				
10.				

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan
Singingi


YUNI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN.1011019002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Asti Elpi Ningsi
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Lancang, 17 Juni 2004
 Alamat : Tebing Tinggi, Benai
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 No.Telp/Wa : 0853-7860-5845
 Alamat E-mail : astielpiningsi@gmail.com



I. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 008 Pulau Lancang (2010-2016)
 MTS : MTS Babussalam Simandolak (2016-2019)
 SMA : SMAN 1 Benai (2019-2022)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi (2022-2026)

II. Riwayat Prestasi

SDN : Selalu Masuk Peringkat 5 Besar
 MTS : Masuk Peringkat 10 Besar
 SMAN : Selalu Masuk Peringkat 3 Besar

Teluk Kuantan, 11 Juni 2026

Asti Elpi Ningsi
220412003